

BAB II

KONDISI KABUPATEN PURWOREJO

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Purworejo

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri ibu kota provinsinya di Kota Semarang yang jaraknya dari Kabupaten Purworejo sejauh 118 km. Transportasi yang dapat digunakan antara lain kendaraan bermotor, mobil, dan bus. Untuk motor dan mobil waktu tempuh yang diperlukan untuk sampai Kota Semarang kurang lebih tiga jam di lalu lintas lancar, sedangkan untuk bus membutuhkan waktu tiga hingga lima jam. Namun waktu tempuh dapat lebih lama jika lalu lintas padat bahkan terjadi kemacetan. Maka dengan jarak dan waktu tempuh dari Kabupaten Purworejo ke Kota Semarang atau sebaliknya pada hari-hari biasa dapat melakukan perjalanan di jam lalu lintas lancar yaitu di jam delapan pagi ke atas atau sebelum di jam berangkat sekolah dan kantor, karena di jam berangkat sekolah dan kantor lalu lintas cenderung padat.

Kondisi wilayah Kabupaten Purworejo secara umum terbagi menjadi dua yaitu daerah perbukitan dan dataran rendah. Dengan posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0-1.064 meter diatas permukaan laut. Ketinggian antara 0-25 meter di atas permukaan laut berada di bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah Kabupaten Purworejo. Wilayah yang dekat dengan Samudera Hindia di sebelah selatan dan dekat dengan Kabupaten Kebumen di sebelah barat. Ketinggian antara 25-1.064 meter diatas permukaan laut yang berada

di bagian utara dan timur merupakan daerah perbukitan. Wilayah bagian utara yang dekat dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang dan bagian timur dekat dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY. Dari luas wilayah secara administrasi adalah sebesar 1.081,45 km², Kabupaten Purworejo berdasarkan topografinya memiliki dua kondisi wilayah yang berbeda.

Secara geografis Kabupaten Purworejo berbatasan dengan empat kabupaten dan satu samudra. Kabupaten Purworejo sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan salah satu dari lima wilayah administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk sisi sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Dari total 16 kecamatan terdapat di Kabupaten Purworejo sebelas kecamatan yang menjadi perbatasan dengan wilayah lain. Dimulai sebelah barat terdapat tiga kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen, tiga kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang, lima kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulon Progo, dan tiga kecamatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dari sebelas kecamatan, sepuluh kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten dan tiga kecamatan yang berbatasan dengan samudra dengan dua diantaranya juga berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Kulon Progo.

2.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Purworejo

Dilihat dari pertumbuhan penduduknya jumlah penduduk Kabupaten Purworejo di tahun 2021 mengalami pertumbuhan 0,62 persen atau 4.924 jiwa dan tercatat dari 799.411 jiwa menjadi 804.335 jiwa di tahun 2022. Dengan komposisi jenis kelamin laki-laki sebanyak 402.939 jiwa dan perempuan sebanyak 401.396 jiwa. Jumlah penduduk laki laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Terdapat kecamatan 7 kecamatan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih rendah dari perempuan yaitu Kecamatan Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Purworejo, Banyuurip, Bayan, dan Butuh. Di tahun 2023 jumlah penduduk kabupaten Purworejo sebesar 807.790 jiwa. Mengalami pertumbuhan penduduk 0,43 persen atau sebesar 3.455 jiwa. Dengan komposisi 405.025 laki-laki dan 402.765 perempuan. Jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Purworejo 89.168 jiwa dan Kecamatan Bagelen 31.542 jiwa. Setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah penduduk dengan presentasi kurang dari satu persen pertumbuhan penduduk, penduduk laki lebih besar dari perempuan, dan penduduk terbesar di Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Bagelen.

Kepadatan penduduk Kabupaten Purworejo tergolong kabupaten yang padat dengan luas wilayah 1.081,45 km² didiami penduduk sebanyak 807.790 jiwa. Dengan Kecamatan Bruno dengan luas wilayah terbesar 105,68 km² dan Kecamatan Kutoarjo dengan luas wilayah terkecil 39,20 km². Kepadatan penduduk Kecamatan Purworejo sebesar 1.674 jiwa/km² merupakan wilayah terpadat, diikuti Kecamatan Kutoarjo dengan kepadatan sebesar 1.617 jiwa/km², sedangkan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kaligesing sebesar

415 jiwa/km². Kecamatan Bruno dengan luas wilayah terbesar sedangkan wilayah terpadatnya adalah Kecamatan Purworejo sebab sebagian besar wilayahnya dipergunakan untuk pemukiman, perkantoran dan pertokoan. Sedangkan Kecamatan Kutoarjo yang wilayahnya terkecil namun termasuk wilayah yang padat. Hal ini menunjukkan bahwa persebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Purworejo tidaklah merata.

Tabel 2.1
Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur Tua Tahun 2023

No	Kelompok Umur	N	%
1.	0-14	165.355	20,47
2.	15-19	58.769	7,28
3.	20-24	61.575	7,62
4.	25-29	60.548	7,5
5.	30-34	56.020	6,93
6.	35-39	54.851	6,79
7.	40-44	54.874	6,79
8.	45-49	52.360	6,48
9.	50-54	52.758	6,53
10.	55-59	54.259	6,72
11.	60-64	48.236	5,97
12.	≥65	88.185	10,92
	JUMLAH	807.790	100

Sumber: *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Tahun 2024* dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2024), diolah

Tabel 2.1 menunjukkan di Kabupaten Purworejo berdasarkan umur. Komposisi penduduk usia kerja (produktif) mulai usia remaja (15-64 tahun) dari 807.790 jiwa terdapat 7,28 persen atau 58.769 jiwa. Komposisi penduduk usia dewasa yang berumur 20-64 tahun dari total penduduk 807.790 jiwa terdapat 61,33 persen atau 495.481 jiwa. Jumlah usia produktif Kabupaten Purworejo pada tahun

2023 hampir tiga perempat (68,61%) dari total penduduk 807.790 jiwa yaitu 554.250 jiwa. Sedangkan penduduk usia muda (0-14 tahun) yakni 165.355 jiwa (20,47%) dan penduduk usia tua (65 tahun keatas) yakni 88.185 jiwa (10,92%). Jika ditotal usia tidak produktif di Kabupaten Purworejo sebesar 253.540 jiwa (31,39%) lebih kecil dari usia produktif sebesar 554.250 jiwa (68,61%).

Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Purworejo sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Aktivitas ekonomi Kabupaten Purworejo pun bergantung pada sektor pertanian. Dengan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 27.784,04 hektare, hasil pertaniannya bermacam-macam, diantaranya padi, jagung, ubi kayu dan hasil palawija lain. Kabupaten Purworejo juga menjadi salah satu sentra penghasil rempah-rempah (Bahasa Jawa: *empon-empon*) di Provinsi Jawa Tengah, yaitu kapulaga, kemukus, temulawak, kencur, kunyit dan jahe. Sentra produksi berada di Kecamatan Kaligesing, Loano dan Bener. Bahkan walau tidak semua masyarakat menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian satu-satunya atau utama. Namun tetap sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor lainnya.

Selain sektor pertanian terdapat beberapa sektor lain yang ada di Kabupaten Purworejo. Di sektor perkebunan, kelapa merupakan tanaman perkebunan rakyat yang menjadi sumber penghasilan kedua setelah padi bagi sebagian besar petani di Kabupaten Purworejo. Tanaman perkebunan lain yaitu mlinjo, durian, pisang, manggis, jambu krisal, kopi, karet, kakao, vanili (tanaman tahunan), tebu, nilam (tanaman semusim), dan tembakau. Di sektor peternakan, hewan ternak yang menjadi khas Kabupaten Purworejo adalah kambing *peranakan etawa* (PE).

Peternakan kambing PE terutama di Kecamatan Kaligesing, yang kambing itu dikawinkan dengan kambing lokal, sehingga tercipta kambing PE ras *Kaligesing*. Wilayah lain yang juga menjadi petenak PE adalah Kecamatan Purworejo, Bruno, dan Kemiri. Sektor perikanan, baik perikanan tangkap yang dilakukan para nelayan pantai laut selatan, perikanan budidaya tambak, dan perikanan budidaya air tawar. Sektor industri, terdapat lima industri besar di Kabupaten Purworejo yaitu, PT Bagelen Raharja Sejahtera/PT Hanjaya Mandala Sampoerna TBK bergerak di bidang rokok, PT Indotama Omicron Kahar bergerak di bidang Jointining Board/kayu olahan, PT Unggulrejo Wasono bergerak di bidang *Karl Grey*, PT Arami Jaya bergerak di bidang produksi ban dalam, PT Anugrah Karya Trisaksi bergerak di bidang kayu olahan. Untuk industri kecil yang ada di Kabupaten Purworejo, diantaranya industri mebel, industri gula kelapa, industri gula kristal, dan industri Kopi Seplawan. Sektor pariwisata, Kabupaten Purworejo mengandalkan 3 pantainya yaitu "Pantai Ketawang", "Pantai Keburuhan (Pasir Puncu)", dan "Pantai Dewaruci di Jatimalang". Objek wisata lain yang ada di Kabupaten Purworejo antara lain, Goa Seplawan, air terjun "Curug Muncar", dan Goa Pencu. Semua sektor tersebut termasuk sektor pertanian mendukung aktivitas perekonomian Kabupaten Purworejo. Sekaligus menjadi potensi wilayah Kabupaten Purworejo.

2.2 Gambaran Umum Desa Jetis, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo

Desa Jetis merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Jarak Desa Jetis dengan alun-alun Purworejo adalah kurang lebih 9,2 km yang membutuhkan waktu tempuh kurang

lebih 17 menit jika ditempuh menggunakan motor. Wilayah Desa Jetis terdiri dari delapan dusun, yaitu Jetak, Tegalsari, Kempul, Soka, Krajan, Tegal, Mlilir, dan Gunung Tumpeng. Akses jalan di Desa Jetis melalui jalan utama yang sebagian besar sudah diaspal yaitu Jl. Jetis Raya dan untuk jalan dalam dusun sebagian besar sudah jalan setapak. Secara geografis, Desa Jetis berada di wilayah dataran rendah dan sebagian berbukit dan secara administratif Desa Jetis berbatasan dengan:

1. Sebelah utara: Desa Wonotopo Kecamatan Gebang
2. Sebelah selatan: Desa Loano
3. Sebelah timur: Desa Loano dan Desa Maron
4. Sebelah barat: Desa Pakem Kecamatan Gebang.

Tabel 2.2

Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur Semester II Tahun 2024

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	00-04	88	85	173
2.	05-09	107	100	207
3.	10-14	112	83	195
4.	15-19	103	121	224
5.	20-24	108	99	207
6.	25-29	107	114	221
7.	30-34	92	78	170
8.	35-39	91	90	181
9.	40-44	91	86	177
10.	45-49	94	101	195
11.	50-54	74	78	152
12.	55-59	75	77	152
13.	60-64	83	64	147
14.	65-69	42	70	112
15.	70-74	40	33	73
16.	75 $\geq$	32	56	88
Total		1.339	1.335	2.674

Sumber: Data Konsolidasi (DKB) Semester II Tahun 2024, diolah

Jumlah penduduk Desa Jetis pada semester II tahun 2024 adalah 2.674 jiwa dari total jumlah penduduk Kecamatan Loano sebesar 39.842 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki 1.339 jiwa dan Perempuan 1.335 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sama. Mata pencaharian utama penduduk adalah bertani, beternak, dan bekerja di sektor informal seperti perdagangan kecil dan jasa. Tingkat pendidikan masyarakat bervariasi mulai dari lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), serta sebagian kecil lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan perguruan tinggi. Dari segi infrastruktur sosial, Desa Jetis memiliki fasilitas dasar seperti sekolah dasar, masjid, mushola, posyandu, dan balai desa. Salah satu isu yang cukup penting di Desa Jetis adalah ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Sebelum adanya Program Pamsimas, sebagian besar warga masih bergantung pada sumber air dari sumur gali dan aliran sungai, serta belum semua rumah memiliki jamban sehat. Oleh karena itu, implementasi Program Pamsimas menjadi salah satu langkah penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan akses air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

2.3 Pengelolaan Air Bersih di Kabupaten Purworejo

Sumber air di Kabupaten Purworejo adalah dari air permukaan dan air tanah. Sungai, mata air, dan waduk/bendungan merupakan jenis air permukaan yang ada di Kabupaten Purworejo. Dari sungai terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Cokroyasan dan Wawar. Lalu mata air yang terdapat di 59 titik dengan total debit 169,2 m³/ detik. Khusus waduk/bendungan masih dalam proses pembangunan yaitu Bendungan Bener. Sedangkan untuk air tanah dibagi menjadi

dua yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal yang umumnya digunakan masyarakat untuk sehari-hari. Potensi air tanah yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Purworejo sebanyak 48.480 m³/ tahun dengan luas 48.480 hektar. Berada pada Cekungan air bawah tanah (CAT) Kebumen-Purworejo yang meliputi Gombong bagian barat sampai Kabupaten Purworejo bagian timur. Dari dua sumber air tersebut masyarakat menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari.

Air yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kelangsungan makhluk hidup. Kebutuhan akan air yang terus mengalami peningkatan mengalami ketidakseimbangan dengan ketersediaan air yang cenderung menurun. Penurunan ketersediaan air ini sangat terasa pada musim kemarau. Di Kabupaten Purworejo hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya di DAS Bogowonto, penurunan debit air disebabkan karena kurangnya sistem penyimpanan air akibat dari berkurangnya daerah konservasi di sekitar aliran sungai. Oleh karena air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Oleh karenanya air termasuk yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pentingnya pemenuhan

kebutuhan terhadap air tersebut menjadikan perlunya pengelolaan Sumber Daya Air dan aturan yang mengatur pengelolaan tersebut.

Sumber Daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang selaras, agar terwujud sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi dalam memenuhi kebutuhan terhadap air secara menyeluruh. Di Kabupaten Purworejo sistem penyediaan air minum dibagi dalam dua sistem layanan, yaitu sistem perkotaan dan sistem pedesaan. Sistem perkotaan dilayani oleh PDAM Tirta Perwita Sari yang merupakan salah satu BUMD di Kabupaten Purworejo dan yang diupayakan oleh masyarakat secara mandiri (sumur gali dan sumur bor). Sedangkan sistem perdesaan selain diupayakan oleh masyarakat secara mandiri (sumur bor dan sumur gali), juga ada intervensi program dari pemerintah misalnya Program Pamsimas dan DAK SPAM (RKPD 2021, hal II – 51). Terkait peraturan pengelolaan air yang pernah berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang kemudian diganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Lalu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang diberlakukan kembali masih belum dapat mengatur pengelolaan Sumber Daya Air secara menyeluruh sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pengaturan mengenai Sumber Daya Air ini

dilakukan agar pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Sumber Daya Air dan air minum masuk ke dalam pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 12 ayat 1 huruf c, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang termasuk urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang artinya pemenuhan kebutuhan dasar warganya wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Kewenangan daerah kabupaten/kota dalam sub urusan Sumber Daya Air adalah mengelola Sumber Daya Air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah kabupaten/kota dan mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam satu daerah kabupaten/kota. Dalam sub urusan air minum, kewenangan daerah kabupaten/kota adalah mengelola dan mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota. Sehingga tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo wajib memenuhi kebutuhan dasar warganya terkait air bersih terutama untuk air minum.

Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk air minum dan sanitasi masyarakat dalam perjalanannya menemui permasalahan. Masalah yang muncul dalam menyelenggarakan urusan pelayanan air bersih yaitu terkait cakupan pelayanan air

bersih yang perlu ditingkatkan disebabkan oleh belum optimalnya penyerapan masyarakat terhadap akses air minum yang telah dibangun. Belum optimalnya cakupan layanan air minum perkotaan yang disebabkan hanya mengandalkan layanan dari PDAM. Mulai dari pipa distribusi dan keengganan masyarakat menjadi pelanggan PDAM yang harus membayar untuk memakai air. Belum optimalnya cakupan layanan air minum pedesaan karena wilayah yang elevasinya lebih tinggi dari sumber air memerlukan biaya operasional lebih tinggi, sedangkan di wilayah pesisir pantai terjadi interusi air laut menyebabkan air untuk minum terasa asin sehingga memerlukan kolam airasi. Kemudian beberapa desa yang sudah membangun SPAM mengalami berkurangnya debit air dari sumber air yang disebabkan oleh penanaman pohon pinus oleh perhutani di dekat sumber air. Permasalahan cakupan akses sanitasi disebabkan oleh kurangnya dukungan dana desa, pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan akses sanitasi layak, serta pola perilaku pola hidup bersih sehat masyarakat yang masih kurang. Belum optimalnya pengembangan akses air minum dan sanitasi layak menjadi masalah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Alternatif solusi yang telah dijalankan untuk menangani masalah urusan penyelenggaraan pelayanan air bersih yaitu meningkatkan cakupan air minum dan sanitasi dengan indikator presentase cakupan air minum dan presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak, serta cakupan akses sanitasi layak. Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) membuat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Fokus kegiatan program pada

review dokumen dan Perbub RISPAM, penyusunan dokumen dan Perbub Jakstrada Air Minum, penyusunan DED SPAM Perdesaan, operasional monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM berbasis masyarakat, pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan, Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ penambahan sumur dalam terlindungi/*Broncapting*, pengembangan jaringan distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di kawasan perkotaan, pembinaan dan pengawasan terhadap KP SPAM/BP SPAM, peningkatan kompetensi pengurus KP SPAM, pemeliharaan jaringan perpipaan SPAM Regional Keburejo, serta perluasan jaringan SPAM perpipaan di kawasan perdesaan. Semua ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih untuk minum layak dan sanitasi layak.

Terkait Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menyelenggarakan program pengelolaan Sumber Daya Air dengan indikator presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik. Kegiatan difokuskan pada peningkatan jaringan irigasi, penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yaitu dokumen DED rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan saluran irigasi dan IPDMIP, pemeliharaan rutin bangunan dan saluran irigasi, pengurusan izin pemakaian tanah irigasi, operasi jaringan irigasi dan pengamanan jaringan irigasi. Untuk saluran pembuangan air dekat jalan dilakukan rehabilitasi saluran drainase dan bangunan drainase irigasi. Kemudian sosialisasi musim tanam, penyusunan dokumen hidrologi, penyediaan bahan banjiriran untuk pemeliharaan darurat, pengadaan peralatan kerja pendukung OP irigasi IPDMIP,

fasilitasi IPDMIP, pembinaan dan pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A). Selanjutnya melakukan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal ini untuk fasilitasi komisi irigasi Kabupaten Purworejo, pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota. Semua kegiatan mulai dari pengelolaan irigasi dan drainase hingga sosialisasi kepada petani dilakukan untuk menangani masalah Sumber Daya Air.

2.4 Kebijakan Pamsimas

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melanjutkan keberhasilan capaian target Millennium Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-MDG), yang telah berhasil menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada Tahun 2015. MDGs (*Millennium Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Milenium merupakan kesepakatan 189 negara anggota PBB yang disepakati pada tahun 2000 dengan target 2015. Berisi delapan tujuan global dan akses terhadap air bersih dan sanitasi serta perlindungan sumber daya alam merupakan tujuan ke 7 (menjamin kelestarian lingkungan hidup). Setelahnya dilanjutkan SDGs (2015-2030), sejalan dengan itu di Tahun 2014 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk melanjutkan komitmennya dengan meluncurkan program nasional Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019 dengan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia. Langkah ini Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu

program andalan nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.

Program Pamsimas I yang dimulai pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 dan Pamsimas II dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 12.000 desa yang tersebar di 233 kabupaten/kota. Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019, Program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 khusus untuk desa-desa di Kabupaten. Program Pamsimas III dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100-100, yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan

prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.

Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*). Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.